

**DATA KEUANGAN BADAN USAHA
NERACA BADAN USAHA**

Per 31 Desember Tahun N dan Tahun N-1

ASET/ASET				LIABILITAS			
No.		TAHUN N	TAHUN N-1	No.		TAHUN N	TAHUN N-1
I.	ASET LANCAR			I.	KEWAJIBAN LANCAR		
1.	Kas dan Bank	Rp.	Rp.	1.	Utang Usaha	Rp.	Rp.
2.	Piutang Usaha	Rp.	Rp.	2.	Utang Bank (Jangka Pendek)	Rp.	Rp.
3.	Persediaan	Rp.	Rp.	3.	Utang Muka Proyek	Rp.	Rp.
4.	Piutang Pajak	Rp.	Rp.	4.	Utang Pajak	Rp.	Rp.
5.	Piutang Lain-Lain	Rp.	Rp.	5.	Biaya yang masih harus dibayar	Rp.	Rp.
6.	Biaya dibayar dimuka	Rp.	Rp.	6.	Utang Jangka Panjang yg sudah jatuh Tempo	Rp.	Rp.
7.	Pekerjaan Dalam Proses (Tagihan Bruto)	Rp.	Rp.	7.	Utang lainnya	Rp.	Rp.
	TOTAL ASET LANCAR (a)	Rp.	Rp.		TOTAL KEWAJIBAN LANCAR (d)	Rp.	Rp.
II.	ASET TETAP			II.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR (e)		
1.	Tanah & Gedung	Rp.	Rp.	1.	Utang Bank (Jangka Panjang)	Rp.	Rp.
2.	Inventaris	Rp.	Rp.	2.	Utang Lainnya	Rp.	Rp.
3.	Peralatan Lainnya	Rp.	Rp.		TOTAL KEWAJIBAN TIDAK LANCAR (e)	Rp.	Rp.
4.	Kumulasi Penyusutan	Rp.	Rp.		TOTAL KEWAJIBAN (d + e)	Rp.	Rp.
	TOTAL ASET TIDAK LANCAR (b)	Rp.	Rp.	III.			
III.	Aset Lainnya (c)	Rp.	Rp.	IV.	TOTAL MODAL / EKUITAS	Rp.	Rp.
	TOTAL ASET	Rp.	Rp.		TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp.	Rp.

Total Ekuitas = Modal Disetor + Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap + Laba Ditahan
Total Aset = Aset lancar + Aset Tidak lancar + Aset Lainnya

Catatan : **Pasal 10 & Pasal 12 PP No. 8 Tahun 2021**
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dengan melakukan pengisian format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. Perseroan perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa :
a. Teguran Tertulis
b. Penghentian Hak Akses atas Layanan
c. Pencabutan Status Badan Hukum

Domisili BU, Tgl-Bln-Thn
Nama Badan Usaha

Stempel Badan Usaha
Tanda Tangan PJB
Materai 10.000

(.....)